

DAFTAR PUSTAKA

- Achidsti, A., Kafa, M. Z., & Hudani, A. M. (2020). Tata Kelola Pendataan Dan Penyaluran BLT-DD Melalui Pasardesa. Id Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 313–326.
- Desa, T. D. (2022). Kemampuan Desa Dalam Mengelola Bantuan Langsung. *Jurnal Neo Societal; Vol*, 7(1).
- Erowati, D., & Sos, S. (2021). *Kebijakan Dana Desa Bagi Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Desa*. Scopindo Media Pustaka.
- Fadhilla, R. A., & Irham, M. (2024). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. *Akua: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 38–47.
- Nasution, L. S. (N.D.). *Politik Jaminan Sosial: Studi Tata Kelola Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid*.
- Nirmala, R., & Susilawati, N. (2022). Dinamika Penerima Program Bantuan Langsung Tunai (Blt) Dana Desa Di Nagari Maek. *Jurnal Perspektif*, 5(4), 592–601.
- Nurhidayat, I. (2023). Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia. *Journal Education And Government Wiyata*, 1(1), 40–52.
- Putra, D. D., Rantelangi, C., & Diyanti, F. (2022). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Perdagangan Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM)*, 7(1), 4.
- Putri, A. (2024). *Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara)*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Qomariyah, N. (N.D.). *PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI DESA SARONGGI*.
- Sedarmayanti, P. S. (2013). Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, Dan Kepemimpinan Masa Depan. *PT. Refika Aditama, Bandung*, 20, 271–273.

Sutanto, H., & Hardiningsih, P. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan BLT-Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19. *Infestasi*, 17(1), 1–10.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa